

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) TERHADAP BELANJA MODAL**

(Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2012)

NASKAH PUBLIKASI



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana
(S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

AYU SINTHA RACHMAWATI

B 200 100 007

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul:
“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2012)”

Yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Sintha Rachmawati
NIM : B 200 100 007
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Penandatanganan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, November 2014

Pembimbing



(Dr. Zulfikar, SE, M. Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, M. Si)

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus di Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2012)**

AYU SINTHA RACHMAWATI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura

Email: sintha.ayu99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu berupa laporan realisasi APBD mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal tahun 2011-2012. Sedangkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh data Produk Domestik Regional Bruto menurut harga konstan tahun 2011-2012. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: *pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal*

A. PENDAHULUAN

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran

daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, melibatkan dua pihak; yaitu eksekutif dan legislatif. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses ratifikasi anggaran.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah.

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Dana Alokasi Umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hal positif yang tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, (Harianto dan Adi 2007).

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), variabel yang digunakan ialah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diambil judul penelitian yaitu “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2012)”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan

tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah yang menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Menurut Darise (2007:143), APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD serta ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan publik.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) setiap tahunnya sedangkan PDRB dapat diukur atas dasar harga konstan di suatu daerah, (Maryanti dan Endrawati 2009).

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan ddaerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah, atau bisa juga dikatakan sebagai pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU 32/2004) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan”kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi atas alokasi yang mengandung *lucrative opportunities* dan memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*.

4. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting, (Darwanto dan Yustikasari 2007).

Dana Alokasi Umum diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Selain itu luas wilayah dan jumlah penduduk menjadi hal yang harus diperhatikan juga dalam pengalokasian DAU. Dengan kata lain, tujuan penting dari pengalokasian DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara Pemda di Indonesia.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

6. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, (Abdul Halim 2008). Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005).

Pengalokasian belanja modal dalam anggaran keuangan daerah terutama pada pembangunan infrastruktur sangat penting karena daerah yang memiliki mobilitas penduduk tinggi dandidukung dengan kondisi geografis yang produktif, akan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lengkap.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data penelitian bersumber dari dokumen laporan realisasi APBN yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2011-2012.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2012.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 Kabupaten dan 8 Kota di Provinsi Sumatera Utara.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai

jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2011-2012.

4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian. Menurut F.N. Kerlinger variabel adalah sebuah konsep. Variabel merupakan konsep yang mempunyai nilai yang bermacam-macam. Suatu konsep dapat diubah menjadi suatu variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan empat variabel independen, kelima variabel penelitian tersebut adalah:

- Variabel Dependen : Belanja Modal
- Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

a. Belanja Modal

Adalah pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal ini diambil dari realisasi belanja modal pada tahun yang bersangkutan. Indikator variabel ini diukur dengan Jutaan Rupiah.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Adalah Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2007). Rumus untuk menghitung Pertumbuhan Ekonomi adalah:

$$G = \frac{\text{PDRB}_1 - \text{PDRB}_0}{\text{PDRB}_0} \times 100\%$$

Keterangan:

G = Laju pertumbuhan ekonomi

PDRB₁ = PDRB ADHK pada suatu tahun

PDRB₀ = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002:132), PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rumus menghitung PAD :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

d. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan

APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum adalah dana transfer yang bersifat umum dari pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2009). Rumus untuk menghitung DAU :

$$\text{DAU} = \frac{\text{Jml DAU untuk Daerah Propinsi} \times \text{Bobot Daerah Propinsi yang Bersangkutan}}{\text{Jml Bobot dari seluruh Daerah Propinsi}}$$

e. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing Kabupaten/ Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

5. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum dan maksimum.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian terdiri dari analisis regresi linier berganda dengan uji f, uji t dan koefisien determinasi (R^2).

D. HASIL PENELITIAN

Tabel 4.7
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	11963.836	21136.867		.566	.573
PDRB	.001	.002	.026	.537	.593
PAD	.428	.036	.710	11.849	.000
DAU	.105	.039	.180	2.697	.009
DAK	1.380	.391	.181	3.528	.001

a. Dependent Variable: BM

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi (PRDB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS, dari hasil tabel 4.7 diatas, maka dapat disusun persamaan regresi:

$$BM = 11963,836 + 0,001PDRB + 0,428PAD + 0,105DAU + 1,380DAK$$

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan:

- 1) Nilai konstanta sebesar 11963,836 yang artinya apabila variabel independen yaitu PDRB, PAD, DAU dan DAK dianggap konstan maka variabel belanja modal dimungkinkan akan meningkat sebesar 11,963,836.
- 2) Koefisien variabel PDRB sebesar 0,001 yang artinya jika variabel PDRB naik sebesar satu satuan, maka variabel belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,001.
- 3) Koefisien variabel PAD sebesar 0,428 yang artinya jika variabel PAD naik sebesar satu satuan, maka variabel belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,428.
- 4) Koefisien variabel DAU sebesar 0,105, yang artinya jika variabel DAU naik sebesar satu satuan, maka variabel belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,105.
- 5) Koefisien variabel DAK sebesar 1,380 yang artinya jika variabel PAD naik sebesar satu satuan, maka variabel belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 1,380.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat ditarik kesimpulan :

1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja

Modal di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang diperoleh nilai signifikan sebesar 0,593 ($0,593 > \alpha = 0,05$).

2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang diperoleh dengan nilai signifikan sebesar 0,000 ($0,000 < \alpha = 0,05$).
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang diperoleh dengan nilai signifikan sebesar 0,009 ($0,009 < \alpha = 0,05$).
4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang diperoleh dengan nilai signifikan sebesar 0,001 ($0,001 < \alpha = 0,05$).

B. Saran

Dengan adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti mendatang hendaknya obyek penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi peneliti mendatang hendaknya penggunaan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

3. Bagi peneliti mendatang sebaiknya melibatkan variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal, seperti ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan principal-agent theory*. Universitas Bengkulu.

Abdullah, Syukriy, Abdul Halim. 2008. *Menggenjot Belanja Modal*. Media Indonesia 25 Agustus 2010.

Adi, Priyo Hari. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Juli 2007.

Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. INDEKS.

Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. SNA X Makasar.

Dickson, V. Dan W, Yu. 2000. *Revenue Structures, The Perceived of Government output and Public Expenditure*. Public Review, Vol. 28 No. 1, 48-65.

- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: UNDIP.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta: Andi.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maryanti, Ulfi dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus di Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 26 ayat 1 tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Belanja Modal*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Cara Menghitung Dana Alokasi Umum menurut Ketentuan*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Dana Perimbangan*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Situngkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara*.

Stine, William F. 1994. *Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical Evidence from Pennsylvania County Governmen in an era of Retrenchment*. National tax Journal 47.

Sukirno. 2007. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: LPFE UI.

Sumarmi, Septianingsih. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Povinsi D. I Yogyakarta*.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta: Andi.

www.djpk.depkeu.go.id

www.sumut.bps.go.id